

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL**

(Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019)

(Skripsi)

Fahrizal syarif hidayatullah



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2022**

## **ABSTRACT**

### ***THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE ON CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION (Study on Provincial Governments in Indonesia 2015-2019)***

**By**

**Fahrizal Syarif Hidayatullah**

*This study aims to analyze the effect of local government financial performance on capital expenditure allocation. This study examines financial performance empirically by using regional financial performance variables as proxied by regional dependence, effectiveness, and efficiency. The samples used in this study are provinces throughout Indonesia that publish financial reports from 2014 to 2019. The type of data used is secondary data, and the data analysis used is descriptive, normality test, and hypothesis testing with SPSS 26.0 software.*

*The results showed that there was a positive influence on the level of dependence and the effectiveness ratio on capital expenditure of a region.*

***Keywords: Dependency Rate, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio***

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019)**

**Oleh**

**Fahrizal Syarif Hidayatullah**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan secara empiris dengan menggunakan variabel kinerja keuangan daerah yang diprosikan dengan ketergantungan daerah, efektivitas, dan efisiensi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif, uji normalitas, dan pengujian hipotesis dengan software SPSS 26.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tingkat ketergantungan dan rasio efektivitas terhadap belanja modal suatu daerah.

***Kata kunci:* Tingkat Ketergantungan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL  
(Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019)**

**Oleh**

**FAHRIZAL SYARIF HIDAYATULLAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PENGARUH KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL  
(Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia  
Tahun 2015-2019)**

Nama Mahasiswa : **Fahrizal Syarif Hidayatullah**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1511031013**

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Dr. Fitra Dharma, S.E.,M.Si.**      **Yenni Agustina, S.E.,M.Si.,Akt.**  
**NIP. 197610232002121002**      **NIP. 198308302006042001**

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**



**Dr. Reni Oktavia, S.E.,M.Si.**  
**NIP 197008171997032002**



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

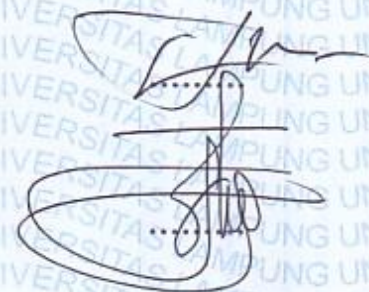
Ketua

: **Dr. Fitra Dharma, S.E.,M.Si.**



Sekretaris

: **Yenni Agustina, S.E.,M.Si.,Akt.**



Penguji Utama

: **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E.,M.Si.**

Dekan Fakultas Ekonomi



**Dr. Nairobi, S.E.,M.Si.**

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 Juni 2022**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Fahrizal Syarif Hidayatullah**

**NPM : 1511031013**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019)” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022

Penulis,



Fahrizal Syarif Hidayatullah  
NPM. 1511031013

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Merambung pada tanggal 16 Juni 1996 sebagai anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Esbarnest Gunawan, S.A.P. dan Ibu Siti Aminah. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Merambung dan lulus tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Kotabumi dan lulus tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kotabumi dan lulus tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis mengikuti tes masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Allah selalu menjawab do’amu dengan 3 cara.  
Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya  
dengan yang lebih baik untukmu”

(Anonim)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi  
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,  
sedang kamu tidak mengetahui”

(QS: Al Baqarah 216)

“Tetap jadi diri sendiri di dunia yang tanpa henti hentinya berusaha mengubahmu  
adalah pencapaian yang hebat”

(Ralph Waldo Emerson)

“Untuk menjadi orang sukses, kita perlu keluar dari zona nyaman”

(Anonymous)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur hanya dipanjatkan kepada Allah SWT yang atas kehendak dan segala nikmat yang telah berikan, sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Kupersembahkan karya sederhana yang disertai dengan perjuangan ini kepada: Kedua Orangtuaku tercinta, Bapak Esbarnest Gunawan, S.A.P. dan Ibu Siti Aminah sebagai tanda bakti dan wujud terima kasih atas limpahan cinta dan kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan, dukungan dan perhatian serta didikannya untuk keberhasilan putra sulungnya.

Kakakku Briptu Faisol Rizki Rahmatullah dan adikku Faisal Rahmawan dan Fauzan Ridho Aditiya yang selalu mendukung dan mendoakan.

Kekasihku Rindi yang selalu mendoakan dan selalu menjadi *support system* kapanpun dan dimanapun.

Seluruh keluarga besar, sahabat dan orang-orang yang menyayangiku yang memberikan semangat tiada henti. Terimakasih atas dukungan dan segala doanya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Serta

Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

## SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2019)”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Liza Alvia, S.E.,M.Sc.,Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.



4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing utama atas kesediaannya yang telah memberikan waktu, arahan, bimbingan, pengetahuan, masukan, dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yenni Agustina, S.E.,M.Si.Ak. selaku dosen Pembimbing Pendamping atas kesediaannya yang telah memberikan waktu, arahan, bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E.,M.Si. selaku dosen penguji utama atas saran dan kritik, arahan serta nasihat yang telah diberikan dalam membangun baik penyelesaian skripsi dan penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh staff Akademik, Administrasi, Tata Usaha, para pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
9. Keluargaku tercinta kedua Orangtuaku, Bapak Esbarnest Gunawan, S.A.P. dan Ibu Siti Aminah, kakakku Briptu Faisol Rizki Rahmatullah, adikku Faisal Rahmawan dan Fauzan Ridho Aditiya. Terimakasih atas cinta yang luar biasa, dan selalu memberikan doa, dukungan, serta perhatian kepada penulis. Semoga dikemudian hari penulis dapat menjadi kebanggaan bagi kalian.
10. Kekasihku Rindi yang selalu sabar dalam mengingatkan, membimbing, memberikan dukungan moral dan bantuan kepada penulis sehingga dapat terus maju menghadapi segala rintangan yang datang.

11. Teman-teman akuntansi baris akhir yang berjuang bersama untuk menyelesaikan studi.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya penelitian dan skripsi ini.

13. Dan almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai mestinya.

Bandarlampung, 30 Juni 2022

Penulis,

Fahrizal Syarif Hidayatullah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Desentralisasi Fiskal .....	7
2.1.2 Teori Agensi .....	7
2.1.3 Alokasi Belanja Modal .....	9
2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu .....	16
2.3 Kerangka Konseptual .....	21
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	21
2.4.1 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Alokasi Belanja.....	21
2.4.2 Pengaruh Rasio Efektifitas Terhadap Alokasi Belanja.....	22
2.4.3 Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Alokasi Belanja.....	24
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Populasi dan Sampel .....	26
3.2 Sumber Data.....	26
3.3 Definisi Operasional.....	27
3.3.1 Variabel Dependen.....	27
3.3.2 Variabel Independen .....	27



3.4 Metode Analisis Data .....	29
3.4.1 Statistik Deskriptif .....	29
3.4.2 Asumsi Klasik .....	30
3.4.3 Analisis Regresi .....	33
3.4.4 Pengujian Hipotesis .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	36
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	36
4.1.2 Uji Asumsi Klasik .....	37
4.1.2.1 Uji Normalitas .....	37
4.1.2.2 Uji Multikolonieritas .....	38
4.1.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	39
4.1.2.4 Uji Autokorelasi .....	39
4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	40
4.1.4 Uji Hipotesis .....	41
4.1.4.1 Uji Statistik F .....	41
4.1.4.2 Uji Koefisien Determinasi .....	42
4.1.4.3 Uji Statistik T .....	42
4.2 Pembahasan .....	43
4.2.1 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Belanja Modal .....	43
4.2.2 Pengaruh Rasio Efektifitas Terhadap Alokasi Belanja .....	44
4.2.3 Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Alokasi Belanja .....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Saran .....	48

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran Efisiensi .....	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	36
Tabel 4.2 Uji Normalitas .....	37
Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas .....	38
Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas .....	39
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi .....	39
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda .....	40
Tabel 4.7 Uji Statistik F .....	41
Tabel 4.8 Tabel Uji R .....	42
Tabel 4.9 Tabel Uji T .....	42

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	21



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan alokasi belanja modal, yang dikeluarkan pemerintah daerah yang bertujuan untuk investasi jangka panjang, yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah yang dapat meningkatkan PAD adalah belanja modal yang produktif salah satunya belanja modal untuk fasilitas umum. Hal ini karena untuk dapat meningkatkan PAD dengan investasi harus memiliki kemampuan keuangan daerah yang juga harus memadai. Sehingga pemerintah daerah diberikan otonomi daerah dalam mengurus urusan ke pemerintahannya sendiri.

Pemerintah dalam mengelola sumberdaya daerah terkhusus dalam pengelolaan keuangan yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD ini kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada publik menurut Indrawan (2013) dalam Puspa (2016). Hal tersebut merupakan penilaian kinerja, dimana menurut Bastian (2006) kinerja merupakan suatu gambaran pencapaian atas pelaksanaan beberapa kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi.

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan (Jumingan, 2006). Menurut Halim (2007), kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selain itu hal tersebut juga merupakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya karena adanya otonomi daerah.

Dan dalam pertumbuhan ekonomi didukung oleh alokasi belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah untuk menunjang hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga akan memberikan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan sebagai acuan bahwa kinerja keuangan dapat memberikan informasi mengenai laju pertumbuhan ekonomi suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangatlah penting untuk dilakukan mengingat pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Pernyataan ini sesuai dengan Greiling (2005) yang mengungkapkan bahwa salah satu kunci sukses dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja. Namun terdapat fenomena mengenai pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami

kontraksi sebesar 5,32 persen year on year (yoy). Angka ini memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang mencapai 5,05 persen.

Pengumuman BPS ini juga mengonfirmasi kontraksi Q2 2020 lebih dalam dari prediksi Kemenkeu di kisaran minus 3,8 persen. Realisasi ini juga lebih buruk dari batas bawah prediksi Kemenkeu di angka minus 5,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Q2 2020 ini disebabkan oleh kontraksi di berbagai komponennya. Pada Q2 2020, BPS juga mencatat sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif. Beberapa yang masih positif antara lain informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air (Thomas, 2020).

Selain itu, pemerintah menyebutkan belanja modal menjadi salah satu instrumen utama untuk menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan belanja modal yang direncanakan sebesar Rp 250,3 triliun pada RAPBN 2021 itu akan digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Sehingga, belanja modal tersebut akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia disebut Alutsista TNI sepanjang 2021 (Suryanto, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya kontraksi pada pertumbuhan perekonomian yang diakibatkan oleh sektor perekonomian yang mengalami pertumbuhan negatif, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ekspor serta impor. Sehingga hal ini menyebabkan pemerintah meningkatkan belanja modal untuk infrastruktur dalam RAPBN 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan aktivitas pembangunan yang meningkat maka ini akan mendukung kenaikan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan di tahun depan.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang memberikan hasil berbeda mengenai kinerja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang sebelumnya oleh Berliani (2016) bahwa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sularso (2011) menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur melalui rasio kemandirian dan rasio efektivitas kurang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Karena masih banyaknya hasil penelitian yang beragam mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali apakah kinerja keuangan pemerintah daerah diukur melalui rasio tingkat ketergantungan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah?
2. Apakah rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah?
3. Apakah rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris bahwa rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menambah studi literatur mengenai rasio keuangan yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
2. Memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya yang sama dimasa yang akan datang dimana bukti empiris tersebut dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Membantu memberikan tambahan pengetahuan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dan memanfaatkan informasi tersebut guna kepentingan pengambilan keputusan.
2. Memberikan informasi agar mampu merencanakan pekerjaan lapangan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangan di masing-masing daerah.



## **II. TINJAUAN PUSTAKAN**

### **2.1 Desentralisasi Fiskal**

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Adanya desentralisasi akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. *World Bank* membagi desentralisasi menjadi tiga jenis, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal. Dari ketiga jenis desentralisasi diatas, maka desentralisasi fiskal menjadi dasar dalam penelitian ini karena desentralisasi fiskal menjelaskan bagaimana pemerintah daerah meningkatkan penerimaan, melakukan pengeluaran, dan menerbitkan surat utang dalam rangka pembiayaan untuk kepentingan daerah.

### **2.2 Teori Agensi**

Teori keagenan dapat menjelaskan pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara salah satu atau beberapa orang pemilik sumber daya ekonomis (sebagai prinsipal) dengan orang lain (sebagai

agen) dimana prinsipal memerintah agen untuk melakukan kegiatan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya tersebut (Jansen dan Meckling, 1976).

Dalam penelitian ini pemerintah pusat selaku prinsipal yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah selaku agen untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dimana pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat mengelola potensi daerah dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Namun, hal ini dapat mengakibatkan konflik antara prinsipal dan agen karena adanya pemisahan kepemilikan.

Pemerintah pusat selaku prinsipal menginginkan agar program-program yang terdesentralisasikan bisa berjalan dengan baik dan tercermin pada pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah daerah (agen). Namun, di sisi lain pemerintah daerah (selaku agen) juga akan mensejahterakan diri mereka sendiri terlihat dari banyaknya penangkapan kepala daerah dalam kasus korupsi.

Dengan demikian, untuk mengendalikan dan untuk penilaian bagi kinerja pemerintah daerah (agen) maka harus mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan melalui laporan keuangan yang dibuat setiap tahun. Lalu, melalui laporan keuangan tersebut dapat dilihat kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang sesuai. Diantaranya, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

### 2.3 Alokasi Belanja Modal

Menurut Halim (2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Mardiasmo (2009) Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharanya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan pengertian belanja modal di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Aset tetap yang berasal dari belanja modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan pembangunan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi serta jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

## **2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan adalah sebuah bentuk laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PSAP No.1).

Laporan keuangan menjadi indikasi yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi dalam suatu entitas. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus memadai sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah maupun pengguna laporan keuangan.

Kinerja keuangan merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Kinerja keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012).

Pengertian kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan menurut (Jumingan, 2006). Dari pengertian kinerja keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kinerja keuangan dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan/program yang sudah dicapai sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sesuai dengan program yang telah ditentukan dan direncanakan pemerintah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik. Menurut Halim (2007) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari pengukuran untuk melihat kondisi keseluruhan ketercapaian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dengan membandingkan anggaran keuangan pemerintah daerah dan realisasi anggaran keuangan pemerintah daerah. penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan/pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2009):

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik.



Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Selanjutnya hasil analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur atau indikator kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio ketergantungan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

#### 1. Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan adalah seberapa besar pemerintah daerah mendapatkan atau bergantung terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (Marfiana & Kurniasih, 2015). Semakin rendah tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut semakin mampu atau mandiri dalam hal bantuan yang diberikan pemerintah pusat/provinsi (Sularso, 2011).

## 2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2012).

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009), adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x=100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

## 3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Mardiasmo, 2004).

**Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran Efisiensi**

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

*Sumber: (Mahsun, 2011)*

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti Terdahulu	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	Berliani, (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka	Variabel independen : a) Rasio ketergantungan daerah b) Rasio efektivitas terhadap PAD c) Rasio efisiensi keuangan daerah d) Rasio keserasian belanja daerah Variabel dependen : pertumbuhan ekonomi	a. Dari hasil uji hipotesis untuk pengaruh kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi, kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. b. Dari hasil uji hipotesis untuk pengaruh efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi, efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. c. Dari hasil uji hipotesis untuk

				<p>pengaruh efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi, efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>d. Dari hasil uji hipotesis untuk pengaruh keserasian belanja terhadap pertumbuhan ekonomi, keserasian belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
2.	Zurkarnain, (2015)	<p>Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Alokasi Belanja Modal Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Aceh</p>	<p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Modal</li> <li>2. Pertumbuhan Ekonomi</li> </ol> <p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Kemandirian daerah</li> <li>2. Rasio Efektivitas Rasio Kemandirian daerah</li> <li>3. Rasio Efisiensi Belanja</li> <li>4. Rasio Keserasian Belanja</li> <li>5. Rasio Belanja Modal</li> </ol>	<p>berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.</p> <p>2. Masing masing dari Rasio ketergantungan daerah daerah, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja dan rasio belanja pegawai signifikan terhadap belanja modal, sedangkan rasio efektifitas berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal</p> <p>3. Rasio ketergantungan daerah daerah, rasio efektifitas,</p>

				rasio efisiensi rasio keserasian belanja, rasio belanja pegawai dan belanja modal secara bersama sama signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Sularso, (2011)	Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanjamodal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Jawa tengah	<p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Derajat desentralisasi</li> <li>b) Ketergantungan keuangan</li> <li>c) Ketergantungan</li> <li>d) Efektivitas PAD</li> <li>e) Ekonomi</li> </ul> <p>Variabel Intervening: belanja modal</p>	Pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten kota Jawa tengah dipengaruhi Kinerja Keuangan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah
4.	Syamsudin, (2015)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan	<p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rasio kemandirian</li> <li>b) Rasio efektivitas</li> <li>c) Efisiensi PAD</li> </ul> <p>Variabel dependen : pengangguran dan kemiskinan</p> <p>Variabel intervening : Pertumbuhan ekonomi</p>	Ratio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Eks-Karesidenan Surakarta. Semakin besar PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

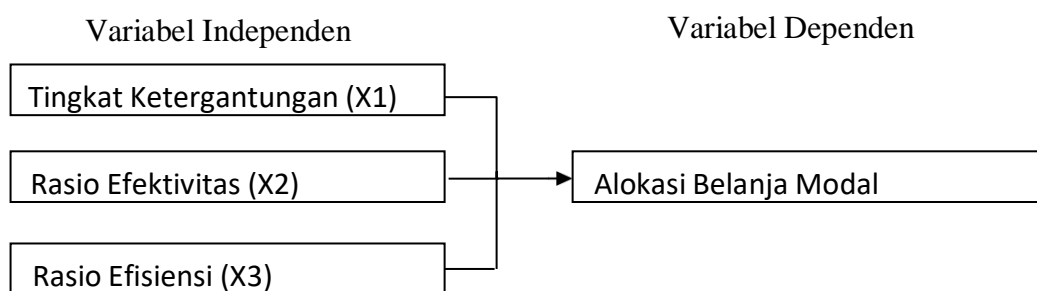
				<p>pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah serta semakin kecil pinjaman dan bantuan pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut. Dengan semakin mandiri daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan</p>
5.	Sari, (2016)	<p>Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004–2014</p>	<p>Variabel independen: Rasio Kemandirian, Rasioketergantungan daerah, dan Rasio Efektivitas</p> <p>Variabel dependen : PDRB</p>	<p>1. Kinerja keuangan dengan rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara. 2. Kinerja keuangan dengan rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara. 3. Kinerja</p>

				keuangan dengan rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara berpengaruh positif dan signifikan.
6.	Martini dan Dwirandra (2015)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio ketergantungan</li> <li>2. Rasio efektivitas PAD</li> <li>3. Rasio tingkat pembiayaan SiLPA</li> <li>4. Rasio ruang fiskal</li> <li>5. Rasio efisiensi</li> <li>6. Rasio kontribusi BUMD</li> </ol> <p>Variabel Dependen: Alokasi Belanja Modal</p>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada Alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio Ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja



				modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.
--	--	--	--	---

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Rerangka Konseptual**

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Alokasi Belanja Modal

Tingkat ketergantungan adalah seberapa besar pemerintah daerah mendapatkan atau bergantung terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (Marfiana & Kurniasih, 2015). Semakin rendah tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut semakin mampu atau mandiri dalam hal bantuan yang diberikan pemerintah pusat/provinsi (Sularso, 2011).

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh tingkat ketergantungan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Praza (2016) Martini dan Dwirandra (2015) yang menghasilkan tingkat

ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa, apabila tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tinggi, maka pemerintah dalam mengalokasikan belanja modalnya rendah. Sedangkan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Gerungan (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam ini merujuk pada penelitian Gerungan (2015). Tingkat ketergantungan yang tinggi maka menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah memiliki kemandirian sehingga dalam pengalokasian belanja modal masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hal ini terjadi untuk meminimalisir konflik dari teori keagenan yang menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi antara pemerintah pusat sebagai *principle* dan pemerintah daerah sebagai agen. Hal ini karena pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah dalam mengurus ke pemerintahannya. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

#### **2.4.2 Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Modal**

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2012). Rasio efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan anggaran penerimaan PAD. Semakin semakin besar tingkat realisasi penerimaan PAD maka semakin baik kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan anggaran PADnya.

Penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Martini dan Dwirandra (2015) menghasilkan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gerungan (2015) bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin tinggi alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Gerungan (2015). Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin tinggi alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin besar penerimaan PAD maka pemerintah daerah dapat melakukan belanja modal untuk berinvestasi kedepannya. Belanja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah belanja untuk aset yang bersifat jangka panjang. Sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan PAD untuk tahun depan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah H2: Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

### **2.4.3 Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal**

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Mardiasmo, 2004).

Hasil penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Martini dan Dwirandra (2015) dan Arif & Arza (2019) menghasilkan rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gerungan (2015) yang hasil penelitiannya menjelaskan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Martini dan Dwirandra (2015) dan Arif & Arza (2019). Hal ini karena Semakin tinggi rasio efisiensi, pengeluaran daerah dalam hal ini belanja modal semakin menurun. Penggunaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan angka rasio yang tinggi dapat disebabkan karena jumlah realisasi pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan itu sendiri, sehingga terjadi pemborosan untuk belanja daerah tetapi tidak digunakan secara maksimal untuk belanja modal.

Hal tersebut dikarenakan lebih besarnya belanja pegawai di daerah dibandingkan belanja modal guna pengembangan dan pembangunan di daerah Martini dan Dwirandra (2015). Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja daerah.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2019. Sampel dipilih dari populasi pemerintah daerah di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2015-2019. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan cara *purposive judgement sampling* yang merupakan bagian dari metode *non probability sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria-kriteria tertentu. Terkait hal ini, anggota populasi yang tidak memenuhi syarat tidak dipilih sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan yaitu:

1. Laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2014-2019.
2. Laporan keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2015-2019 yang mencantumkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian.

#### **3.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder

(*secondary data*) yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengakses website resmi dari BPK ([www.e-ppid.bpk.go.id](http://www.e-ppid.bpk.go.id)).

### 3.3 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Definisi operasional masing masing variabel adalah sebagai berikut:

#### 3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

##### 1. Alokasi Belanja Daerah

Alokasi belanja modal adalah alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dibandingkan dengan total belanja dalam APBD. Alokasi belanja modal dalam penelitian ini diukur dengan:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

#### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable

yang lainnya (variabel dependen). Pengaruh yang dapat diberikan variable bebas bias berupa pengaruh positif atau negatif terhadap variable terikat.

Efek yang dihasilkan adalah terjadi kenaikan atau penurunan nilai dari variabel terikat jika kita menambah atau mengurangi nilai variabel bebas yang digunakan dalam model yang digunakan. Dengan kata lain, Variabel bebas adalah variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Dalam penelitian ini variable independen (variabel bebas) yang digunakan adalah: ketergantungan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

### **1. Rasio Ketergantungan Daerah**

Rasio ketergantungan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan suatu daerah pada pemerintah pusat. Semakin rendah tingkat rasio ketergantungan keuangan suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut semakin mampu atau mandiri dalam hal bantuan yang diberikan pemerintah pusat/provinsi (Sularso, 2011). Proksi yang digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan daerah adalah sebagai berikut:

$$Ketergantungan\ Daerah = \frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

### **2. Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas adalah rasio yang mendeskripsikan realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan anggaran penerimaan PAD. Semakin PAD melebihi anggaran penerimaan PAD maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam



menggali potensi PAD di daerah masing-masing. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin efektif dan positif (Sularso, 2011). Rasio efektivitas dihitung menggunakan proksi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Efisiensi

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Menurut Halim (2012) rasio efisiensi keuangan daerah dapat diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## 3.4 Metode Analisis Data

### 3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016).

### 3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memiliki tujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Suatu model regresi yang baik adalah data terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov* (*K-S test*). Dasar pengambilan keputusan dari *One Sample Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat dari nilai *asymptotic significant (2- Tailed)* dengan kriteria:

- a) Nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $> 0,05$ , maka mengindikasikan data terdistribusi secara normal.
- b) Nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $< 0,05$ , maka mengindikasikan data tidak terdistribusi secara normal.

#### 2. Uji multikolonieritas

Digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- (a) Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- (b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- (c) Multikolonieritas juga dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor*. Setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai  $Tolerance \leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 0,10$ .

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Suatu model regresi yang baik seharusnya terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik scatterplot. Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen melalui pengolahan

data dengan bantuan software SPSS. Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2016). Sementara itu, diagram scatterplot dihasilkan melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan melihat diagram scatterplot adalah sebagai berikut:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol sumbu y maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **4. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016).

### 3.4.3 Analisis Regresi

Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang lebih dari dua variabel terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Penggunaan regresi linier berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sehingga dapat membedakan kedua variabel dalam penelitian (Ghozali, 2016). Persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ABM = \alpha + \beta_1 TKG + \beta_2 REFK + \beta_3 REFS + e$$

Keterangan:

ABM = Alokasi Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

TKG = Tingkat Ketergantungan

REFK = Rasio Efektivitas

REFS = Rasio Efisiensi

$e$  = *error*

### 3.4.4 Pengujian Hipotesis

Menurut Ghozali (2016), ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai *actual* dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t.

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji yang dikehendaki statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak).  $H_0$  yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya perhitungan tersebut dianggap tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

### **1. Uji Kelayakan Model Regresi (Uji F)**

Dalam penelitian ini uji statistik F digunakan untuk memastikan bahwa model penelitian yang telah dirumuskan dapat diterapkan dalam penelitian ini. Uji model dilakukan dengan menggunakan uji F. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan nilai *probability value* (p value) maupun F hitung. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan p value atau F hitung adalah jika p value  $< 0,05$  atau F hitung  $\geq F$  tabel maka  $H_a$  diterima, artinya model regresi dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian. Sebaliknya, jika p value  $\geq 0,05$  F hitung  $< F$  table maka  $H_a$  ditolak, artinya model regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016).

### **2. Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan

satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu menunjukkan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki variabel dependen (Ghozali, 2016).

### **3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t)**

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Penerapan uji ini didasarkan pada hipotesis nol ( $H_0$ ) yang akan diuji hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Dasar pengambilan keputusan pada uji statistik t adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < 0,05$ ) maka hipotesis terdukung, yang berarti secara individual variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka hipotesis tidak terdukung, yang berarti secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)”, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal yang diukur menggunakan rasio belanja modal. Ditunjukkan dengan hasil pengujian t bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai *sig.*  $0,000 < 0,05$  dengan nilai beta sebesar 0,170.
2. Rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal yang diukur menggunakan rasio belanja modal. Ditunjukkan dengan hasil pengujian t bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai *sig.*  $0,047 < 0,05$  dengan nilai beta sebesar 0,086.
3. Rasio efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal yang diukur menggunakan rasio belanja modal. Ditunjukkan dengan hasil pengujian t bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai *sig.*  $0,010 < 0,05$  dengan nilai beta sebesar - 0,237.



## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Melihat variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lainnya.
2. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan pengukuran lain seperti Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Indeks Kemampuan Rutin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad Dan Fefri Indra Arza. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 2.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Berliani, Kartika. 2016. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal Indonesia Membangun* ISSN: 1412-6907 Vol. 2, No.1.
- Fahmi, Irham. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan”, Bandung: Alfabeta
- Gerungan, Sylfia Febriany, David P.E Saerang, dan Winston Pontoh. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol. 6, No. 1.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 23. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Greiling, Dorothea. 2005. Performance Measurement in the Public Sector: the German Experience. *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 54: 7.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jensen, Michael C dan William H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, No. 4, Hal.305-360.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohamad. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *E-Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret*. Vol. 1 No.1.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martini, Kadek dan A.A.N.B Dwirandra. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. *E-journal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 10, No. 2*.
- Muryawan, Sang Made dan Made Sukarsa. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol 5, No. 2*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1. 2007. Penyajian Laporan Keuangan
- Praza, Eko Indra. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 4, No. 1*.
- Prihastuti, Asepma Hygi, Taufeni Taufik, dan Restu Agusti. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 10, No. 2*.
- Puspa, Indah. 2016. Pengaruh Pemerintah Daerah, Penadapatan Asli Daerah, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legeslatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. 3 No. 1*.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Sari, Greydi Normala, Paulus Kindangen dan Tri Oldy Rotinsulu. 2016. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara tahun 2004-2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 18 No 2*.
- Siregar, Helly Aroza. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis, Vol. 1 No. 1*.
- Sondakh, Karina Hillegonda, Debby Ch Rotinsulu, dan Tri Oldy Rotinsulu. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulut Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 19, No. 6*.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di jawa tengah. *Media Akuntansi Riset, Vol 1 No 2 Agustus 2011*.
- Suryanto, Venny. 2020. Kebutuhan belanja modal naik, Kemenkeu: Akan fokus untuk pembangunan infrastruktur. 22 Agustus 2020. Diakses pada, Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/kebutuhan-belanja-modal-naik-kemenkeu-akan-fokus-untuk-pembangunan-infrastruktur>.
- Syamsudin, Bayu Tri Cahya, dan Syahrina Nurmala Dewi. 2015. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol 17, No 05*.
- Thomas, Vincent Fabian. 2020. Pertumbuhan Ekonomi RI Q2 2020 Minus 5,32%, Terburuk Sejak 1999. 22 Agustus 2020. Diakses pada Tirto.id, <https://tirto.id/pertumbuhan-ekonomi-ri-q2-2020-minus-532-terburuk-sejak-1999-fVQK>.
- Zurkarnain, M.S. 2015. Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui alokasi belanja modal di kabupaten dan kota provinsi aceh. *Jurnal Manajemen Sains, 3 (4), 423-435*.